

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTANAMAN KOTA PALU

Mohammad Rendy

Rendytaha@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The objectives of the study are to find out and to analyze the evaluation of integrated waste management policy at Department of Hygiene and Horticulture of Palu City. The type of the study is qualitative research by taking purposively the implementer informant and target policy of Palu. Technique of data collection consisted of observation, interview and documentation. While technique of data analysis are data reduction, display data and taking conclusion and verification. The result of study showed that the evaluation of integrated waste management policy has been implemented but not maximized yet because there were problems in the evaluation criteria such as effectiveness, efficiency and adequacy. Effectiveness has not been achieved due to lack of support and awareness in waste management. Efficiency has not been achieved because of the behavior and awareness of the environment is still low. Besides the operational time for waste disposal has not been fully obeyed. Whereas the criteria of adequacy has not been able to solve the problem in hygiene and environmental health because of garbage dump such as TPS, TPST pose a foul odor in the area. So, indirectly affect the hygiene and public health.

Keywords: *Policy, Evaluation, Effectiveness, Efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness.*

Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang professional. Pengelolaan sampah yang professional dan baik akan menyebabkan terkelolanya sampah sehingga cermin kota semakin baik. Namun sebaliknya, pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan wajah kota tidak menarik, bau busuk dan menyebabkan salah satu timbulnya sumber penyakit.

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi komplek, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-

lain. Sampah yang paling banyak adalah sampah rumah tangga 84,64%, kemudian sampah pasar 2,52% dan sampah kawasan industri 2,58%.

Permasalahan sampah telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, sehingga telah menempatkannya sebagai salah satu isu utama bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah secara alami. Pertumbuhan penduduk yang demikian besar sudah barang tentu akan menjadi masalah bagi kota-kota besar, terutama jika dilihat dari jumlah timbunan sampah yang besar, serta pencemaran yang akan diakibatkan oleh tumpukan sampah yang tidak terangkut. Oleh karena itu pemerintah kota dituntut untuk dapat mengatasi masalah ini sebaik-baiknya, agar tidak sampai pada tahap mencemari lingkungan.

Pemerintah hendaknya mencermati secara khusus kebijakan pengelolaan sampah

ini, karena dalam penanganan sampah pemerintah harus menganggarkan secara khusus, bahwa untuk menghitung biaya penghimpunan persampahan kota dapat dilakukan sebagaiberikut, semakin tinggi pendapatan penduduk maka semakin tinggi pula biaya penghimpunan sampahnya, hal ini dikarenakan upah-upah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tinggi. Tetapi biaya penghimpunan dalam persen terhadap total pendapatan kecil, mengingat pendapatan di Negara industry sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang dimana *income* per kapita kecil.

Mencermati pernyataan di atas jelas bahwa biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah berbanding lurus atau sebanding dengan tingkat pendapatan suatu masyarakat, hal ini membawa implikasi bahwa biaya pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk daerah perkotaan pastiakan lebih besar daripada pengelolaan sampah di pedesaan. Untuk itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan masalah pengelolaan sampah ini dengan baik, dengan manajemen pengelolaan sampah sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan mulai memperhatikan yang bertanggungjawab akan pengelolaan sampah, dengan anggaran (biaya) yang khusus pula dan yang juga penting untuk diperhatikan adalah masalah teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk diantaranya dalam peletakan TPS, TPST dan Bank sampah. Pemerintah harus membuat program kebersihan kota dan penanggulangan sampah secara berkesinambungan.

Selain itu juga Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan kebijakan Publik yang dilakoni oleh pemerintah. Melalui regulasi pemerintah berharap bisa menangani sampah melalui penerapan sanksi dan membuat aturan-aturan yang ketat disertai sanksi yang cukup tegas. Ketegasan sikap pemerintah melalui regulasi pengelolaan sampah kadang berhasil namun juga kadang tidak berhasil.

Berhasil apabila penerapannya tegas dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak menaatinya. Sedangkan yang tidak berhasil, berimplikasi pada wajah kota semakin semrawut, jorok dan bau busuk akibat sampah tersebar kemana-mana.

Perkembangan kota Palu dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini semakin maju dan berkembang dengan sangat cepat. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana kota tersebar di 8 Kecamatan yakni Palu Timur, Palu Barat, Palu Utara, Mantikulore, Ulujadi, Tatanga. Mall, pertokoan, jalan, jembatan, sarana perkantoran tumbuh dengan pesat disertai dengan kemacetan. Implikasi perkembangan kota Palu tersebut tentu akan membawa dampak terhadap peningkatan jumlah penduduk yang pada akhirnya akan menambah timbunan limbah padat perkotaan (sampah). Sementara itu pengelolaan sampah di Kota Palu masih mempunyai banyak kendala, seperti belum optimalnya pengelolaan sampah, baik ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat dalam pengelolaannya.

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu sebenarnya telah di atur melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun implementasi Peraturan Daerah ini tidak efektif dilaksanakan di lapangan. Belum Nampak aspek penyelesaian masalah dari peraturan daerah tersebut, padahal jika dilihat dari tujuan, sasaran dan isi dari Peraturan Daerah tersebut semestinya bisa mengatasi masalah sampah yang ada di kota Palu.

Hasil observasi menunjukkan kelemahan dari implementasi kebijakan Perda no. 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kota palu terlihat pada beberapa factor yang menjadi rujukan teori pada penelitian ini yakni :

Factor efektivitas, dilihat dari ketepatan waktu pengelolaan sampah sampai pada lokasi Tempat Pengelolaan Sampah belum menunjukkan ketepatan waktu yang diharapkan. *Factor responsiveness*, berkaitan dengan tingkat kepedulian lembaga (Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Palu) dan masyarakat belum memperlihatkan kepedulian dan perilaku yang mengarah pada bagaimana sampah di buang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka mendorong minat peneliti untuk mengkaji dan menelaah serta untuk memperoleh pemahaman mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Palu, dengan mengamati dan menganalisa fenomena yang tampak dilapangan, penulis mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu. Dari latar belakang diatas akan dikaji masalah yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu yang dirumuskan sebagai berikut: Mengapa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu belum mencapai Tujuan yang di harapkan?

Tujuan umum penelitian ini adalah: Untuk mengetahui “mengapa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu belum mencapai tujuan sesuai yang di harapkan dalam Peraturan Daerah?

Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis.(1). Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam pada pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya kajian Kebijakan public lebih khusus lagi berkaitan dengan evaluasi kebijakan. (2).Secara praktis. manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palu khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. Sedangkan dalam tesis ini menggunakan fokus kajian Evaluasi Kebijakan menurut Dunn (2000:6 10).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suandi (2008 : 1) *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Kota Palu yang terdiri dari 8 Kecamatan dengan unit analisis adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu? Sedangkan lama waktu penelitian akan dilakukan selama 3 bulan yaitu sejak bulan April sampai bulan Juni 2015.

Dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif, maka pada penelitian ini peneliti menetapkan Informan secara *purposive sampling* artinya orang yang dipilih adalah mereka yang mengetahui secara persis informasi maupun data yang dibutuhkan.Oleh karena itu informan yang dipilih terdiri dari: Sekertaris Dinas Kebersihan Kota Palu, kepala Seksi pengaduan persampahan, Kepala Seksi Pengangkutan Sampah, petugas Persampahan Kota Palu, dan masyarakat.

Agar penelitian ini lebih mengarah pada masalah yang akan diteliti maka diperlukan suatu definisi konsep pada teori yang digunakan agar memudahkan mengoperasionalkan definisi konsep tersebut dilapangan. Adapun definisi Konsep pada penelitian ini yaitu :

1. Efektifitas

Penilaian terhadap efektifitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil /tujuan.Parameternya adalah sampah sampai di TPA tepat waktu.

2. Efisiensi

Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah retribusi sampah yang dibayar berbanding dengan kebersihan.

3. Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Parameternya adalah tidak ada sampah dilokasi TPS**4. Equity / pemerataan**

Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor – aktor yang terlibat. Parameternya adalah minimnya keluhan dan sikap protes dari masyarakat.

5. Responsiveness

Penilaian terhadap responsiveness ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup. parameternya adalah ada media untuk melaporkan keluhan.

6. Appropriateness/ketepatangunaan

Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencan/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Parameternya adalah pengelolaan sampah di Kota Palu terkelola dengan baik.

Wiliam Dunn (2000:6:10)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian, buku, atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang memiliki hubungan dengan lokasi dan tujuan penelitian serta majalah, internet dan

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Pengamatan (*observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Artinya peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi ditempat penelitian sehingga penulis mendapat gambaran dalam melakukan penelitian.
4. Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yakni tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi ditempat penelitian, pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan secara terstruktur, di mana menurut Sugioyono (2010 : 157) bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data.
5. Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara *intens* sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian data dengan menelaah berbagai literature atau dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam setiap pelaksanaan penelitian selalu berusaha untuk mendapatkan data Basrowi dan Suwanti (2008 : 1-2) mengatakan penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka instrument pada penelitian ini adalah peneliti sendiri artinya peneliti yang menentukan keberhasilan penelitian.

Menurut Nasution (1996 : 142) analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami

maknanya. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pengelolaan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah, dan dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah dalam hal kebersihan melalui kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Kota Palu maka evaluasi kebijakan dalam penelitian ini dianalisis dari berbagai aspek, di antaranya efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*).

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Efektivitas memiliki banyak makna dalam kajian ilmiah,

namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada.

2. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan yang dijalankan. Efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dinyatakan efisien jika pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil maksimal. Penelitian ini melihat efisiensi dari seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Ketepatan (*adequacy*)

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menekankan kecukupan pada tingkat pencapaian hasil tentang ketepatan dalam pemecahan masalah dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

4. Perataan (*equity*)

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat

hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran. Perataan pada penelitian ini dilihat dari penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang didistribusikan secara adil kepada sasaran kebijakan.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Penelitian ini melihat responsivitas dari penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan pelaksana dan dan sasaran.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan pada penelitian ini menekankan pada hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu sudah dijalankan namun belum maksimal karena masih terjadi masalah pada kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, dan kecukupan. Efektivitas belum tercapai karena kurangnya kontrol dari pihak yang bersangkutan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, kemudian efisiensi belum tercapai karena perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah, selain itu waktu operasional pembuangan sampah yang ditentukan belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan kriteria kecukupan (*adequacy*) juga belum dapat memecahkan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan karena keberadaan TPS, TPST dan Bank Sampah hanya menimbulkan bau busuk di lingkungan sekitar sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka disarankan kepada Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta jajaran Kecamatan agar dapat meningkatkan tingkat efektivitasnya dalam mengelola sampah di TPS, TPST bahkan Bank Sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, selain itu tingkat efisiensi lebih tingkatkan melalui perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan mematuhi aturan dalam pembuangan sampah sesuai waktu yang ditentukan, serta perlunya meningkatkan pengelolaan sampah. Tiap kecamatan agar dapat memecahkan masalah di masyarakat terkait dengan bau busuk dan lingkungan yang kotor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Prof. Dr. Sultan., M.Si dan Bapak Dr. Muzakir Tawil., M.Si. Semoga semua bentuk dukungan, dorongan dalam rangka penulisan artikel ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 1994. *Public Personnel Management and public policy*. New York: Addison Wesley Longman.
- 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- 2009. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: HaninditaGraha Widia.
- Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto. 2010. Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VII No. 3, Hal. 183-192.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Milles, Mathew B & A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc.
- Moleong, Lexi J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. 2009. “*Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Bantaran Sungai*”.<http://puskim.pu.go.id/berita/sosialisasi-peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sampah-berbasis-3-r-di-bantaran-sungai>.Bandung. [23/08/2014].
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945